

**EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh
MIRANDA OKTAVIA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Miranda Oktavia

Masalah umum yang dihadapi oleh perkotaan di Indonesia, termasuk Bandar Lampung adalah pembuangan sampah padat dan ketersediaan tempat pembuangan akhir. Pada berita media cetak dan media *online* menyebutkan bahwa minimnya fasilitas penampung sampah di Bandar Lampung membuat banyak sampah yang berserakan di pinggir jalan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendukung maupun penghambatnya. Pelaksanaan implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan indikator isi kebijakan dan konteks implementasi. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengolahan persampahan yang disebutkan antara lain, kebijakan pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya dengan pola meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan mengembangkan sistem insentif dan disinsentif. Faktor pendukung dalam kebijakan pengelolaan sampah adalah adanya kerja sama antara dinas terkait dengan berbagai pihak dalam mengelola sampah, sedangkan yang menjadi penghambat adalah kepatuhan masyarakat akan kebijakan pengelolaan sampah ini masih kurang sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik.

Kata Kunci : Kebijakan, Pengelolaan Sampah

ABSTRAK

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY IN BANDAR LAMPUNG CITY

**By
Miranda Oktavia**

A common problem faced by cities in Indonesia, including Bandar Lampung is solid waste disposal and the availability of landfills. In print and online media news mentioned that the lack of garbage collection facilities in Bandar Lampung makes a lot of garbage scattered on the roadside. This study aims to describe the implementation and evaluate the implementation of government policies in waste management in the city of Bandar Lampung so that the supporting and inhibiting factors can be identified. The implementation of policy implementation is carried out using indicators of policy content and implementation context. In the Bandar Lampung City regional regulation on waste processing mentioned, among others, the policy to reduce waste as much as possible starts from the source with a pattern of increasing understanding to the public about 3R (reduce, reuse, recycle) efforts and developing an incentive and disincentive system. Supporting factors in waste management policies are the cooperation between the relevant agencies with various parties in managing waste, while the obstacle is that community compliance with this waste management policy is still lacking so there are still many people who litter. Then it can be concluded that waste management in Bandar Lampung City has run quite well.

Keywords: Policy, Waste Management

**EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh
MIRANDA OKTAVIA

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

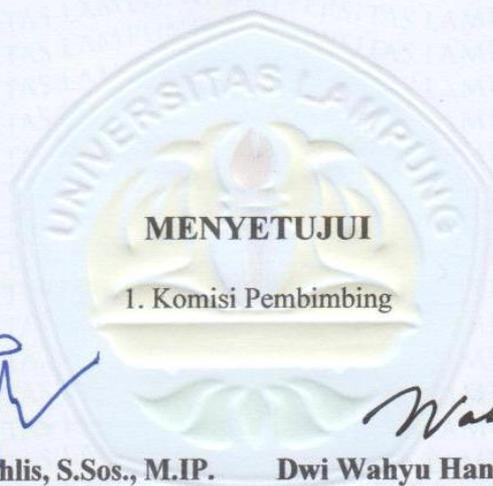
Judul Skripsi : **EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Miranda Oktavia**

No. Pokok Mahasiswa : **1416021067**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.
NIP 19780430 200812 1 001

Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.
NIP 19780328 200812 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

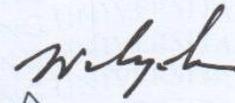
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

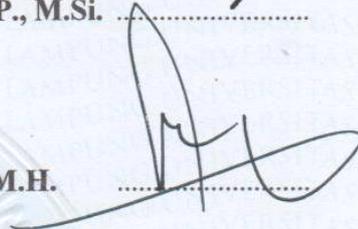
Ketua : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.**



Sekretaris : **Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.**



Penguji : **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya

NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **21 Agustus 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan



Miranda Oktavia
NPM. 1416 021 067

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Miranda Oktavia. Dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 10 Oktober 1995.

Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Sukamaju, Teluk Betung Timur, yang diselesaikan pada tahun 2008. SMP Negeri 12 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011 dan kemudian penulis melanjutkan sekolah di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2014.

Pada saat aktif sebagai mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi kampus di tingkat fakultas.. Penulis mengabdikan ilmu dan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat dengan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Batu Liman Indah, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan selama 40 hari.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 216)

“Berdoalah kepadaku, Niscaya Akan Kuperkenankan (Permintaan) Bagimu”

(QS. Al-Mukmin: 60)

"Sesungguhnya jika kita berikhtiar dengan bersungguh-sungguh maka proses tak akan pernah menghinati hasil"

(Miranda Oktavia)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamini segala puji bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Sempurna. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah Rasulullah Muhammad SAW.

Ku Persembahkan Karya Sederhana ini Kepada:

Ayahanda ku dan Ibunda ku, yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dan do'a sehingga anak mu ini yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya.

Adik-adikku tersayang,. Terima kasih atas doa, kasih sayang, canda tawa dan semangat yang kalian berikan.

Keluarga Besar Kakek Marhumayah dan Nenek Kartini serta Paman dan Bibi.
Terima kasih atas doa dan dukungannya.

Sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah di lakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, berkat rahmatmu ya Allah ‘Azza Wa Jalla yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan berbagai Nikmat dan Karunia-Nya, dan tak lupa sebagai penulis sampaikan kepada suri tauladan kehidupan kita semua umat Islam Nabi Muhammad SAW, Semoga kita mencontoh suri tauladan kita Aamiin Allahuma Aamiin.

Sebuah perjuangan yang dimulai dari harapan seorang penulis untuk dapat menggapai cita-citanya kelak dengan penuh semangat dan tanpa mengeluh, penulis dapat menyelesaikan kewajiban skripsi dengan judul **EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Alhamdulillah penulis dapat menempuh pendidikan di FISIP Universitas Lampung kurang lebih lima tahun, penelitian ini boleh dikatakan sebagai titik awal untuk meyakini seorang sarjana, penulis menyadari keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu penulis banyak memperoleh bimbingan, saran, dan masukan dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulisan karya ini. Oleh karena itu dalam kesempatan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah ‘Azza Wa Jalla Rabb semesta alam yang telah memberikan nikmat iman yang luar biasa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam,

sehingga penulis di beri kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan karya ini.

2. Ibunda Noverda dan Ayahanda Amriwan, yang selalu memberiku semangat dan tidak kenal lelah dalam mendidikku. Terima kasih untuk doa-doa yang kalian panjatkan selama ini demi kelancaranku dalam menempuh pendidikan.
3. Adikku Nova Dwi Marantika terima kasih sudah menjadi adikku yang baik dan penurut serta tukang ngambek, aku selalu berharap bisa menjadi inspirasi dan contoh yang baik untuk dirimu. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan juga kesehatan sehingga kita bisa menikmati keberhasilan kita dimasa depan.
4. Keluarga Besar Kakek Marhumsyah serta Nenek Kartini yang turut mendukung dan turut mendo'akan agar penulis dapat menyelesaikan studi. Terimakasih atas dukungannya baik secara moril maupun materil.
5. Best Partner, yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta selalu memanjatkan do'a untuk kesuksesanku. Terimakasih yang tak terhingga atas semangat dan dukungan di saat penulis sedang berjuang. Semoga kelak kesuksesan selalu menyertai langkah kita dan apa yang kita rencanakan di masa depan dapat tercapai, Aamiin.
6. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan juga selaku Pembimbing Akademik penulis ucapkan terimakasih atas bimbingannya selama ini.
7. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

8. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, Sos. M.IP selaku pembimbing utama penulis yang sangat luar biasa kebaikan dan kesabarannya selama ini telah memberikan kritik dan sarannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik, semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP. M.Si, selaku pembimbing kedua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih atas kesabarannya meluangkan waktu guna membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik, semoga ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Bapak Drs. Aman Toto D, M.H selaku dosen pembahas terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritikan dan saran selama proses penyelesaian skripsi ini, semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terimakasih banyak atas ilmu yang bermanfaat, pengalaman serta kerjasamanya dari awal perkuliahan hingga saya menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama ini, semoga kita semua kedepannya sukses dan dalam lindungan Allah SWT.
13. Sahabat-sahabat hebat dan penuh canda tawa, Ratih Retno Aji, Miss Retno Ulandari, Intan Permata Sari. terima kasih atas kebersamaan, motivasi dan bantuannya selama ini semoga kelak kita sukses dan tetap dalam lindungan Allah SWT.

14. Sahabat-sahabat Team GG, Atika Maharani, Salma Nazihah, Desi Wulandari, Zahra Yuzhintya Santoso, Fitri Chairani, Winda Astria, Futi Mardiyati, terima kasih atas kebersamaan, dan bantuannya selama ini semoga kelak kita sukses dan tetap dalam lindungan Allah SWT.
15. Sahabat-sahabat KKN Desa Batu Liman Indah, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Deviana Saputri, Nita Yuliana, Dedeh Suryani, Fadhel dzaki, Dicky Kurniawan AM, Micho Saputra. Panji Setiawan, Latiffah, Nur, dan Mas Udin terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan bantuannya selama ini semoga kelak kita sukses serta tetap terjaga silaturahmi dan tetap dalam lindungan Allah SWT.
16. Para narasumber telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, kritikan dan saran selaa proses penyelesaian skripsi ini dan pemberian informasi, semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT
17. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang berharga.

Bandar Lampung, Agustus 2019

Penulis

Miranda Oktavia

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kebijakan.....	11
1. Pengertian Kebijakan	11
2. Tahap Kebijakan	14
3. Pengertian Implementasi Kebijakan	16
B. Tinjauan Tentang Implementasi	16
1. Pengertian Implementasi.....	16
2. Teori-Teori Implementasi	18
3. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi	29
C. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan.....	31
1. Pengertian Evaluasi Kebijakan	31
2. Pendekatan Evaluasi Kebijakan.....	32
D. Tinjauan tentang Sampah	33
1. Pengertian Sampah	33
2. Klasifikasi Sampah	34
3. Pengelolaan Sampah	37
E. Kerangka Pikir.....	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	43
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	46
D. Informan	47
E. Jenis dan Sumber data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Pengolahan Data.....	49
H. Teknik Analisis Data	50
I. Teknik Keabsahan Data.....	51
IV. GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung.....	52
B. Perubahan Unit Pelaksana Pengelolaan Sampah.....	54
C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH).....	58
1. Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH).....	58

2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	58
3. Visi dan Misi.....	70
D. Gambaran Umum Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandar Lampung	71
1. Sejarah Berdirinya Perusahaan Daerah Pasar.....	71
2. Dasar Hukum Terbentuknya Perusahaan Daerah Pasar.....	72
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	72
4. Visi dan Misi.....	74
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	76
1. Isi Kebijakan.....	79
a. Derajat perubahan yang diinginkan.....	80
b. Kedudukan pembuat kebijakan.....	81
c. Pelaksana program.....	84
d. Sumber daya.....	85
e. Jenis dan manfaat yang dihasilkan.....	88
2. Konteks Implementasi.....	90
a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.....	90
b. Karakteristik lembaga dan penguasa.....	92
c. Kepatuhan dan daya tanggap.....	93
B. Analisis.....	94
1. Isi Kebijakan.....	95
a. Derajat perubahan yang diinginkan.....	95
b. Kedudukan pembuat kebijakan.....	96
c. Pelaksana program.....	96
d. Sumber daya.....	97
e. Jenis dan manfaat yang dihasilkan.....	99
2. Konteks Implementasi.....	100
a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat..	100
b. Karakteristik lembaga dan penguasa.....	100
c. Kepatuhan dan daya tanggap.....	101
3. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat.....	101
VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data sampah tahunan TPA Bakung	6
Tabel 1.2 Penelitian sejenis	7
Tabel 3 Informan	47
Tabel 5 Triangulasi Data	103

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Fikir	42
Gambar 5.1 Hasil Dokumen	103

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kebutuhan dasar diantaranya sandang, papan, dan pangan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar tersebut terkadang manusia tidak sadar dengan limbah yang dihasilkan setelah menggunakan atau mengkonsumsinya, antara lain berupa sampah. Sampah sampai saat ini masih menjadi permasalahan utama terutama di kota-kota besar. Pada gilirannya, sampah yang tidak dikelola dengan baik serta kebijakan pengelolaan sampah yang tidak terorganisir dengan tepat dapat mempengaruhi lingkungan hidup.

Selain itu dengan adanya penambahan jumlah penduduk, jika pengelolaan sampah tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya tumpukan sampah di berbagai tempat. Kecenderungan jumlah penduduk yang semakin meningkat akan menimbulkan dampak adanya buangan/limbah yang meningkat dan bervariasi. Buangan tersebut bisa berupa sampah padat ataupun limbah cair yang merupakan hasil aktivitas baik dari pemukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya (Notoatmodjo, 2003:166).

Kehadiran sampah saat ini dan masa mendatang diprediksikan akan terus bertambah seiring dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudradjat (2008:6) menyatakan bahwa permasalahan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya berpengaruh pada berbagai sisi kehidupan terutama di kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Palembang, dan Medan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, produksi sampah per hari tertinggi berada di Pulau Jawa, khususnya Surabaya. Pada 2015, produksi sampah di Surabaya sebesar 9.475,21 meter kubik dan meningkat menjadi 9.710,61 meter kubik di 2016¹. Pertumbuhan jumlah sampah di Indonesia setiap tahun meningkat secara tajam, sebagai contoh di Jakarta, dengan jumlah penduduk sekitar 10,25 juta jiwa pada 2016, produksi sampahnya diperkirakan sebesar 7.099,08 meter kubik, meningkat dari 7.046,39 meter kubik pada tahun sebelumnya. Sementara Surabaya, sebagai kota dengan produksi sampah tertinggi di Indonesia, meskipun dihuni oleh 2,87 juta jiwa pada 2017, jumlah produksi sampah di 2016 sebesar 9.710,61 meter kubik.

Kemampuan pemerintah dalam menangani sampah pada kota-kota berkategori besar di Indonesia masih terbatas dan belum maksimal. Sampah yang tidak terkelola dengan baik merupakan salah satu penyebab makin meningkatnya pencemaran air dan tanah serta meningkatkan potensi banjir. Oleh karena itu

¹(<https://tirto.id/mengintip-kota-kota-gudang-sampah-di-indonesia-cE4o>"Mengintip Kota-kota Gudang Sampah di Indonesia") diakses pada tanggal 14 april 2019

masalah persampahan perlu ditangani secara serius dengan teknis operasional dan manajemen yang tepat serta terpadu berdasarkan kondisi dan kebijakan daerah masing-masing (Darmanto, 2012:175).

Masalah umum yang dihadapi oleh perkotaan di Indonesia, termasuk perkotaan di Lampung, adalah pembuangan sampah padat dan ketersediaan tempat pembuangan akhir. Pada berita media cetak dan media *online* menyebutkan bahwa minimnya fasilitas penampung sampah di Bandar Lampung, membuat banyak sampah yang berserakan di pinggir jalan². Selain itu, beberapa sungai di Bandar Lampung seperti Way Kedaton, Way Penengahan, Wai Awi, dan Way Gintung dihiasi berbagai jenis sampah, khususnya sampah rumah tangga, menumpuk di tepian sungai yang mengering di tengah musim kemarau.

Volume sampah di Bandar Lampung pada tahun 2017 yang lalu mencapai 800-850 ton per hari. Pada tahun sebelumnya, volume sampah di Kota Tapis Berseri ini sekitar 700-750 ton per hari. Berdasarkan pada data tersebut, berarti volume sampah di Kota Bandar Lampung bertambah kira-kira 100 ton per hari. Jika tidak ada tindakan nyata pada level masing-masing pihak, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat serta masyarakat itu sendiri untuk peduli sampah, maka persoalan sampah akan menjadi bencana bagi kota ini.³

Pada kasus yang lain, keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan sampah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar Tempat Pembuangan

² (<http://www.kupastuntas.co/2018/10/banyak-sampah-berserakan-dlh-bandarlampung-tambah-kontainer-di-beberapa-titik-penampungan/>) diakses pada 18 Agustus 2018.

³ (<http://lampung.tribunnews.com/2018/08/13/sampah-hiasi-sungai-sungai-kecil-di-bandar-lampung>) diakses pada 18 Agustus 2018.

Akhir (TPA). Proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan dari sampah padat (*solid waste*) dan sampah yang dihasilkan dari dalam kota atau dari daerah nonkota, telah menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan oleh mereka yang terlibat dalam manajemen pengelolaan sampah. Manajemen pengelolaan persampahan harus memberikan alternatif solusi yang terbaik seperti metode manajemen sampah padat yang berkelanjutan (*sustainable solid waste management*) yakni suatu solusi yang lebih efisien, secara teknik tepat, dan secara sosial dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan (Darmanto, 2012:177).

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 197,22 km² yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.015.910 jiwa (berdasarkan data tahun 2017). Saat ini Kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung. Semakin berkembangnya kota Bandar Lampung maka makin meningkat pula jumlah sampah yang terangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. sekitar 850 ton/hari dengan menggunakan 15 armada truk, dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung dengan menggunakan teknologi *open dumping* sejak tahun 1998, sedangkan sebelumnya menggunakan sistem *sanitary landfill*⁴.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Perda tersebut menjelaskan tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah. Pasal 18 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun rencana

⁴ (<https://www.saibumi.com/artikel-72969-pengelolaan-sampah-di-bandar-lampung-jadikan-alternatif-yang-menguntungkan.html>). diakses pada 18 Agustus 2018.

pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Rencana strategis pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Target pengurangan sampah;
- b. Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber timbulan sampah sampai dengan TPA;
- c. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sumber timbulan sampah; dan
- e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung secara teknis saat ini dilakukan oleh 4 (empat) instansi yaitu:

- (1) Untuk Dinas Lingkungan Hidup menangani sampah di jalan protokol, sapuan jalan, pertokoan, restoran, hotel, industri, perkantoran dan fasilitas umum;
- (2) Untuk sampah di terminal bis antar kota dan dalam kota serta stasiun kereta api dikelola oleh Dinas Perhubungan;
- (3) Sampah di 10 pasar tradisional dikelola oleh PD Pasar;
- (4) Sampah di pemukiman di kelola oleh kecamatan melalui Sokli.

Berdasarkan data sampah tahunan di Kota Bandar Lampung yang masuk ke UPT TPA Bakung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Tahun	Jumlah sampah rata-rata per hari	Jumlah sampah rata-rata per tahun
1	2015	840	306.600
2	2016	790	284.400
3	2017	850	310.250
4	2018	900	328.500
5	2019	975	-

Sumber: UPT TPA Bakung Juli 2019

Data timbunan sampah di atas merupakan jumlah sampah yang dihasilkan dari setiap sumber yang menghasilkan sampah-sampah yang terdiri dari setiap golongan sampah. Dalam hal ini Penanganan permasalahan sampah tidak dapat hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja. Kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat luas menjadi persyaratannya. Pemerintah merupakan penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan perumusan kebijakan, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki penguasaan atas informasi berkenaan dengan sumber produksi sampah, proses pengelolaan dan bagaimana hasil pengelolaan dimanfaatkan menjadi sumber pendapatan daerah.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Selain itu kurang optimalnya pengelolaan sampah akibat kurang koordinasi antar instansi yang menangani permasalahan sampah juga menjadi salah satu penyebabnya. Hal

tersebut penting diketahui agar dapat mencari solusi yang tepat guna menurunkan jumlah produksi sampah dan mendapat gambaran tentang pola pengelolaan sampah yang tepat. Dalam kaitan itulah keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan menjadi sangat penting sehingga proses dari implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian sejenis dapat di jelaskan sebagai tabel berikut:

Tabel 1.2

No	Nama	Tahun	Isi
1	Dimas	2017	Menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah Gemah Ripah di Dusun Badegan Desa Bantul Kecamatan Bantul Yogyakarta dilatar belakangi oleh dorongan yang ada dalam diri pribadi dan karena ada ajakan dari pihak luar baik dari teman maupun pengurus Bank Sampah Gemah Ripah Bantul itu sendiri. Tingkat partisipasi yang diberikan anggota bank sampah terhadap kegiatan pengelolaan sampah pada saat perencanaan kegiatan sangat terbatas bagi anggota/ nasabah bank sampah. Pada saat implementasi kegiatan, terdapat satu tingkat partisipasi yaitu terdapat mekanisme <i>take and give</i> dalam kegiatan pengelolaan sampah antara anggota dengan pihak Bank Sampah Gemah Ripah Bantul yaitu tingkat <i>partnership</i> .
2	Ismawati	2017	Menyatakan bahwa permasalahan sampah dapat diatasi jika masyarakat maupun pemerintah mampu dan memiliki kemauan dalam menjalankan tugas dan kewajiban pengelolaan sampah dengan penuh tanggung jawab. Bentuk keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang menghasilkan sampah dengan proporsi terbesar, dapat dilaksanakan dengan membudayakan perilaku pengelolaan sampah semenjak dini dari rumah tangga sebagai struktur terendah dalam pengelolaan sampah perkotaan.
3	Martinawati	2014	Menyatakan bahwa upaya mengatasi permasalahan sampah yang kian memperihatinkan membutuhkan keikutsertaan masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam proses ini, maka dapat dikatakan mustahil pemerintah sendiri dapat mengatasi masalah sampah yang kian hari kian menumpuk. Jika ada partisipasi demikian setidaknya dapat mengurangi beban sampah di TPA, pewardahan dan pengumpulan/pengangkutan dari sumber sampah.
4	Talib	2016	Menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya masyarakat dalam hal pengelolaan sampah untuk

			menjaga kebersihan lingkungan, yaitu membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
5	Yuliasuti	2015	Menyatakan bahwa timbulan sampah ini harus dikelola dengan bantuan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat tergantung kepada pemahaman, kemauan dan pendapatan masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan.

Pada kelima penelitian di atas, secara nyata dilibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah mutlak untuk dilakukan. Kelima peneliti tersebut di atas membahas mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan di lokasi penelitian masing-masing. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah partisipasi masyarakat menjadi bagian penting yang tak dapat terpisahkan dengan peranan pemerintah karena merekalah sumber penghasil sampah. Salah satu bagian penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah adalah partisipasi aktif dari masyarakat serta didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mendukung kegiatan tata kelola persampahan secara terpadu dan berkelanjutan.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan kelima penelitian di atas adalah, peneliti menekankan pada evaluasi dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Pilihan terhadap fokus tersebut didasarkan pada fakta bahwa pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung masih belum efektif jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung juga belum dapat berjalan secara maksimal. Sejak pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan

Pertamanan hingga beralih ke Dinas Lingkungan Hidup saat ini, khususnya dalam mengatasi volume sampah yang ada di wilayah kota Bandar Lampung yang tiap harinya meningkat hingga mencapai ± 10.000 ton pertahun.

Secara faktual, pilihan untuk menjadikan peran pemerintah penting dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan sampah sebagai fokus dalam penelitian ini adalah bahwa hampir tidak ada penanganan lebih lanjut dalam pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung serta faktor-faktor apa yang mendukung atau menghambat implementasinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengevaluasi tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengevaluasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah serta memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan di dalam mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber rujukan bagi Pemerintah Daerah mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sehingga pemerintah dapat mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut.
- b. Membantu memberikan kontribusi pemikiran dalam mengkaji, memahami serta mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Bandar Lampung
- c. Memperluas pengetahuan tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Bandar Lampung

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Secara bahasa atau etimologi, kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:49), diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan.

Menurut Steiner dan Miner (2007:22), kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berpikir. Secara lebih khusus kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan mengarahkan tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Kebijakan menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Adapun Menurut Lasswell (dalam Sopianto,2015:18), kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu di pikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan negara berdasarkan kewenangannya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat akan terselsaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat dapat dilihat dari hasil kebijakan yang ditetapkannya.

Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam penyelesaian masalah yang sedang terjadi. Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan

dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang menjabarkan pada masyarakat pelayanan apa yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu.

Carl J Federick (dalam Agustino,2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Penilaian kebijakan banyak dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan. Dampak kebijakan itu mempunyai beberapa macam dimensi, dimana hal ini harus dipertimbangkan dalam melaksanakan penilaian terhadap kebijakan.

Menurut Islamy (2007:5), kebijakan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sehingga *policy* lebih tepat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata *wisdom*. Berdasarkan beberapa

definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

2. Tahapan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik untuk membagi proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian ini memudahkan dalam mengkaji kebijakan. Menurut Dunn (dalam Winarno, 2012:36), tahap-tahap kebijakan adalah:

a. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives* atau *policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi pemerintahan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi sebagaimana dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seharusnya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

B. Tinjauan Tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Menurut Sopiarno (2015:8) istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2008:65) implementasi adalah memahami apa yang

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian dari implementasi adalah kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya suatu aturan atau kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Browne dan Wildavsky (dalam Usman, 2002:70), mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan Majone dan Wildavsky di dalam Nurdin Usman mengemukakan implementasi sebagai evaluasi.

Sementara itu, Schubert di dalam Nurdin Usman, mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Usman (2002:70) menambahkan bahwa implementasi adalah sesuatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Berbagai pendapat di atas memberikan arahan konsep bahwa Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana

kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2. Teori-Teori Implementasi

Impelementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap tidak ada perubahan lagi. Subarsono (2008:89) mengemukakan beberapa teori implementasi yang dikutip berdasarkan pendapat para ahli, yaitu diantaranya:

a. Teori George C. Edward

Dalam pandangan Edward, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumber Daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat

berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor maupun sumber daya finansial atau uang/anggaran.

- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
- 4) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Menurut Edward, Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

b. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Teori ini berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu Karakteristik masalah, Karakteristik Kebijakan, dan Lingkungan Kebijakan.

1) Karakteristik Masalah.

Karakteristik masalah terdiri dari :

- a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana di satu pihak terdapat beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan.
- b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran relatif sama.
- c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah program akan relative sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar
- d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dimana sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan dibanding program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

2) Karakteristik Kebijakan

Karakteristik kebijakan terdiri dari:

- a) Kejelasan isi kebijakan, yaitu, karena semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka akan lebih mudah diimplementasikan, karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.
- b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, di mana kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada modifikasi.
- c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, di mana sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan biaya.
- d) Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, di mana kegagalan kerja sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. Tingkat komitmen aparat, terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di negara-negara dunia ke tiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen

aparatus untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.

- f) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, di mana suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan dibanding program yang tidak melibatkan masyarakat.

3) Lingkungan Kebijakan

Lingkungan Kebijakan terdiri atas:

- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi dimana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.
- b) Dukungan publik sebuah kebijakan, dimana kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik, sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-intensif, misalnya kenaikan harga BBM akan kurang mendapatkan dukungan publik.
- c) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), dimana kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, yaitu kelompok dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan, dan kelompok

pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap badan-badan pelaksana.

d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial, sehingga aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

c. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, yang menyatakan bahwa terdapat enam variabel untuk menilai implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan dilaksanakan.
- 2) Sumber Daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia.
- 3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

- 4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

d. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program dalam implementasinya, yakni, (a) kondisi lingkungan, (b) hubungan antar organisasi, (c) sumber daya organisasi untuk implementasi program, dan (d) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

e. Teori David L. Wimer dan Aidan R. Vining

Welmer dan Vining mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu:

- 1) Logika kebijakan. Dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapatkan dukungan teoritis.
- 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan social, politik, ekonomi, hankam, dan fisik, atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, bias saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda.
- 3) Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

f. Teori Merilee S. Grindle

- a. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target grup, sejauh mana perubahan yang

diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994:22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu : Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,

Pada point ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

2. Derajat perubahan yang diinginkan.

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran *relative* lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.

3. Kedudukan pembuat kebijakan,

Pada bagian ini harus dijelaskan dimana kedudukan pembuat kebijakan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah kedudukan sebuah program sudah tepat. Misalnya, ketika BKKBN memiliki program peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memberikan bantuan dana kepada keluarga prasejahtera, banyak orang menanyakan apakah letak program ini sudah tepat berada di BKKBN

4. Siapa pelaksana program,

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

5. Sumber daya yang digunakan.

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para *actor* yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa.

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Oleh karena itu, peneliti memutuskan pada penelitian ini menggunakan indikator penelitian model Marilee S. Grindle yaitu menyangkut isi kebijakan serta konteks implementasinya.

3. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi

Menurut Sunggono (2004:39), terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi, yaitu diantaranya:

a. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan bisa gagal atau tidak berhasil karena masih samarnya isi kebijakan. Maksudnya adalah bahwa apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana, dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap kegagalan sebuah implementasi kebijakan.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat sulit apabila pada proses pengimplementasiannya tidak cukup memperoleh dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Penyebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya pada akhirnya perlu dilakukan.

C. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut Winarno (2012:229) mengatakan bahwa secara umum Evaluasi Kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan, dengan demikian evaluasi kebijakan bisa diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak kebijakan.

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan yang gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Sedangkan menurut Dunn dalam Agustino (2008:187) evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan.

Evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian menurut Dunn (dalam Nugroho, 2012:730), yaitu:

- a. Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan.

- b. Evaluasi dalam proses pelaksanaan.
- c. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan.

2. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2012 :319-320) ada beberapa pendekatan terhadap evaluasi kebijakan sebagai berikut :

- a. Evaluasi semu adalah proses pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari model evaluasi ini adalah bahwa ukuran tentang manfaat dan nilai merupakan suatu yang dapat terbukti sendiri oleh ukuran-ukuran masing-masing individu, kelompok ataupun masyarakat.
- b. Evaluasi formal (*formal evaluator*) tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil kebijakan yang didasarkan atas tujuan formal kebijakan secara deskriptif. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.
- c. Evaluasi keputusan teoritis (*decission theoretic evaluator*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan

mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam.

D. Tinjauan tentang Sampah

1. Pengertian Sampah

Untuk mengetahui dan mengenal tentang pengertian sampah maka berikut ini dikemukakan berbagai definisi dan batasan mengenai sampah yang banyak tertulis dalam buku yang bersumber dari beberapa organisasi dan ahli persampahan serta lingkungan, antara lain (Trisna, 2014:4) :

- a. Menurut WHO expert commite, Jhon Pickford- *Solid wastes are useless, unwanted or discarded material arises from man's activities and not free-following.*
- b. Menurut George Tehobanoglous, *solid wastes are all that are normally solid and and that are discarded as useless and unwanted.*
- c. Menurut Tandjung, sampah adalah sesuatu yang tak berguna lagi, di buang oleh pemiliknya atau pemakai semula.
- d. Mandelan, sampah adalah limbah padat yang di buat dari aktivitas Manusia.
- e. Menurut istilah untuk manajemen, Ecolink, sampah adalah sesuatu bahan yang terbuang atau terbuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.
- f. Menurut Radyastuti, sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.
- g. Berdasarkan SK SNI 19-2454, sampah adalah limbah padat yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang sudah di anggap tidak berguna lagi

dan terus di kelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

- h. Menurut Anwar, sampah adalah segala sesuatu yang tidak berguna, tidak bernilai dan tidak di inginkan lagi pada saat dimana pemiliknya membuangnya yang dapat berasal dari hasil aktivitas baik manusia maupun makhluk hidup lainnya namun dapat bernilai pada saat pihak kedua memanfaatkannya.
- i. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka secara sederhana sampah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari kegiatan atau aktivitas manusia atau makhluk hidup lainnya yang berbentuk padat yang tidak di inginkan lagi dan di anggap tidak berguna pada waktu tertentu.

2. Klasifikasi Sampah

- a. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa sampah terdiri atas:
 - 1) Sampah rumah tangga, sampah ini berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - 2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sampah ini berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

3) Sampah spesifik. Sampah ini meliputi: sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul tidak secara periodik.

b. Berdasarkan Asalnya Secara umum, jenis sampah berdasarkan asalnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sampah organik dan sampah anorganik (Mallongi dan Saleh, 2015:28):

1) Sampah organik

Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, pertanian, perkantoran, dan kegiatan lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Sampah organik itu adalah sampah dari dapur seperti sisa makanan, sayuran, kulit buah, rempah-rempah dan lain-lain.

2) Sampah anorganik

Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral, minyak bumi, dan atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagai zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diurai oleh alam, sedangkan sebagian lainnya hanya dapat diurai dalam waktu yang sangat lama. Sampah dalam jenis ini dalam tingkat rumah tangga dalam bentuk botol kaca, botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Kertas, Koran dan karton yang berupa pengecualian.

- c. Berdasarkan asalnya, kertas, Koran dan karton termasuk sampah organik. Tetapi karena kertas, Koran dan karton dapat di daur ulang seperti sampah anorganik lain (misalnya gelas, kaleng dan plastik), maka dimasukkan kedalam kelompok sampah anorganik.
- d. Berdasarkan sifatnya Secara garis besar sampah dapat di golongankan sebagai berikut (Mallongi dan Saleh, 2015:28):
- 1) *Degradable waste* (sampah yang mudah membusuk atau terurai). Sampah ini dapat di urai secara sempurna oleh proses biologi baik aerob maupun anaerob misalnya: sisa makanan, sayuran, daging dan lain-lain.
 - 2) *Non-Degradable waste* (sampah tidak mudah terurai atau membusuk) yaitu: plastik, kaleng bekas dan lain-lain. Jenis sampah ini dapat di bagi lagi menjadi:
 - a) *Recyclable*, sampah yang dapat di olah dan digunakan kembali karena memiliki nilai ekonomis seperti plastik, kertas, pakaian dan lainnya.
 - b) *Non-recyclable*, sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau di ubah kembali seperti *tetra pacs, carbon paper, thermo coal* dan lain-lain.
 - 3) *Combustable waste* (sampah yang mudah terbakar), misalnya kertas, daun-daun kering, dan lain-lain.
 - 4) *Non-Combustable waste* (sampah yang tidak mudah terbakar), misalnya: besi, kaleng bekas, gelas dan lain-lain.

3. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan Pembatasan timbulan sampah, Pendaaur ulangan sampah, dan Pemanfaatan kembali sampah. Sedang kegiatan penanganan sampah meliputi :

- Pemilahan, dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah.
- Pengumpulan, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara / tempat pengolahan sampah terpadu.
- Pengangkutan, yaitu membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah.

sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, dan pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan yang sebelumnya menuju ke media lingkungan secara aman.

Untuk pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab pemerintah. Saat ini, pengelolaan sampah yang sering digunakan dalam masyarakat adalah 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang berarti pengurangan, penggunaan

kembali, dan pendaurulangan. Dalam Vesilind (2012) menjelaskan mengenai metode pengelolaan sampah sebagai berikut :

1. *Reduction* (pengurangan)

Pengurangan sampah dapat dicapai dengan tiga cara :

- Mengurangi jumlah bahan yang digunakan dari tiap produk tanpa mengorbankan fungsi produk
- Meningkatkan masa hidup suatu produk
- Mengurangi / menghilangkan kebutuhan penggunaan suatu produk

2. *Reuse* (penggunaan kembali)

Yaitu menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya (penggunaan barang bekas)

3. *Recycling* (pendaurulangan)

Proses pendaurulangan membutuhkan pemisahan dari materi yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan. Materi sampah yang dapat didaurulang berupa sampah padat seperti kertas, logam, plastik, kaca, dan sampah dari lahan.

4. *Recovery* (pemulihan)

Proses ini rata-rata digunakan untuk sampah yang terbuat tidak dari 1 material. Sebagai contoh : kaleng minuman, terbuat dari baja (steel), seng, dan kertas pembungkus pada bagian luar. Proses recovery ini melalui suatu mesin yang dapat memulihkan bagian tertentu dari produk sehingga dapat digunakan kembali.

5. *Disposal of Solid Waste in Landfills* (pembuangan sampah padat di lahan)

Sampah padat disini menjadi bagian dari bahan urugan tanah.

6. *Energy Conversion* (pengubahan energi)

Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh energi dengan penguraian dan pembentukan bahan bakar melalui pembakaran sampah sehingga didapat tekanan / panas.

E. Kerangka Pikir

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai pedoman pengelolaan sampah di Indonesia, ditekankan bahwa sampah telah menimbulkan permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Disadari bahwa sampah sebagai buangan dari aktifitas domestik, komersil maupun industri tidak dapat dihindari. Kecenderungannya bahkan semakin kompleks dan meningkat kuantitasnya sejalan dengan perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu, pertumbuhan jumlah penduduk maupun dinamika kehidupan masyarakat, serta tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam upaya mengurangi sampah dari tingkat sumber sampah sampai pengelolaan sampah itu sendiri.

Meskipun berbagai regulasi telah dikeluarkan, pemerintah dan pemerintah daerah masih belum mempunyai strategi jitu yang bersifat massal dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini. Padahal sebagian besar sampah kota yang dihasilkan di Indonesia tergolong sampah hayati dengan jumlah di atas 65 % dari total sampah di mana sampah jenis ini masih sangat mungkin untuk diolah kembali menjadi sesuatu yang memberi manfaat. Melihat komposisi dari sumber asalnya maka

sebagian besar adalah sisa-sisa makanan dari sampah dapur, maka jenis sampah ini akan cepat membusuk, atau terdegradasi oleh mikro organisme dan berpotensi pula sebagai sumber daya penghasil kompos, metan dan energi.

Secara normatif, banyaknya sampah yang dihasilkan harus diolah dengan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan efek negatif seperti mencemari lingkungan yang mana dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan banjir, serta penyumbatan sistem drainase dan sebagainya. Namun ternyata, kesadaran untuk mengolah sampah dengan baik di dalam masyarakat masih minim. Hal ini dapat dilihat dari anggapan masyarakat mengenai sampah itu sendiri yang dianggap sebagai limbah yang tak memberikan manfaat maupun anggapan bahwa urusan sampah adalah urusan pemerintah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Perda tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah. Pasal 18 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis pengurangan dan penanganan sampah yang berisi:

- a) Target pengurangan sampah
- b) Target penyediaan sarana-prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber timbulan sampah sampai dengan TPA
- c) Pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat
- d) Target kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sumber timbulan sampah, dan

- e) Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung, atas Perda Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Sebenarnya sangat banyak pendekatan yang ada dalam rangka mengevaluasi proses implementasi. Namun, model implementasi yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah Model Merilee S. Grindle yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek isi kebijakan dan konteks kebijakan. Pendekatan Merilee S. Grindle ini dipilih karena memberikan panduan yang komprehensif bukan hanya menyangkut bagaimana atau konteks implementasinya, namun juga menyangkut isi kebijakannya.

Pada aspek isi kebijakan, variabel yang akan dievaluasi adalah: (1) Jenis manfaat yang akan dihasilkan, (2) Derajat perubahan yang diinginkan, (3) Kedudukan pembuat kebijakan, (4) Siapa pelaksana program, dan (5) Sumber daya yang digunakan. Sementara dalam konteks implementasinya, faktor yang akan dievaluasi adalah: (1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, (2) Karakteristik lembaga dan penguasa, serta (3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Secara lebih rinci, kerangka pikir tersebut tergambar dalam bagan berikut :



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2013:6), mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Moleong (2013:6) menambahkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian kualitatif secara substansi melihat suatu proses atas fenomena dan bukan menilai hubungan atau pengaruh antar fenomena

Menurut Sugiyono (2009:9), metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sedangkan Sukmadinata (dalam Sugiyono, 2009:9), menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dan memberi gambaran melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Maka peneliti mengambil tipe penelitian Kualitatif dengan mendeskripsikan Evaluasi Implementasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kota Bandar Lampung.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di

lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga antara rumusan masalah, tujuan penelitian dan fokus penelitian ini saling berkaitan.

Menurut Moleong (2013:94) penetapan fokus adalah sesuatu hal yang penting dalam penelitian, artinya dengan penetapan fokus dapat membatasi studi agar penelitian tidak melebar. Dengan fokus penelitian dapat diketahui persis data mana dan data tentang apa dikumpulkan dan data mana pula, yang walaupun menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Oleh karena itu dengan penetapan fokus yang jelas, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu ataupun data yang akan dibuang.

Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan sisi tujuan, akan memperoleh gambaran tentang bagaimana proses implementasinya sehingga akan diketahui faktor yang menjadi pendorong atau penghambat dalam implementasinya. Untuk mengeksplorasinya, peneliti menggunakan model Merilee S. Grindle yang menekankan keberhasilan implementasi pada dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*), yaitu meliputi

1. Isi Kebijakan :

- a) Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
- b) Derajat perubahan yang diinginkan,
- c) Kedudukan pembuat kebijakan,
- d) Siapa pelaksana program,

- e) Sumber daya yang digunakan
2. Konteks implementasi:
- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat,
 - b) Karakteristik lembaga dan penguasa,
 - c) Kepatuhan dan daya tanggap

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian, terutama sekali dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi ditentukan dengan sengaja. Dalam penentuan lokasi penelitian ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dengan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga juga dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Mempertimbangkan hal di atas, maka penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung. Pertimbangannya, volume sampah di Kota Bandar Lampung mencapai 800-850 ton per hari meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 700-750 ton per hari. Data tersebut menunjukkan bahwa *trend* peningkatan jumlah sampah di Kota Bandar Lampung selalu meningkat setiap tahun. Meskipun telah terdapat Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah seperti halnya aturan tersebut tidak terlalu signifikan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat maupun berkurangnya volume sampah.

D. Informan

Informan adalah orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Kota Bandar Lampung. Dalam menentukan Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan teknik ini agar didapati informasi dengan tingkat validitas dan reabilitas yang tinggi. Adapun yang menjadi informan di dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3. Data Informan

Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara
Nasrobi Sugara	Kepala Sub Bag.Umum dan KepegawaianDinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	06 Maret 2019
Edy Gulvari	Direktur Utama PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung	26 Februari 2019
Jamhuriyanto	Sub Bag.Keuangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	25 Februari 2019
Mulyadi	Petugas Sokli	02 April 2019
Budi	Petugas Sokli	02 April 2019
Firli	Petugas Sokli	02 April 2019
Sarmin	Petugas Sokli	02 April 2019
Fitriansyah	Petugas Penimbang Sampah TPA Bakung	01 April 2019
Yulianti	Staf Kantor TPA Bakung	01 April 2019
Amirudin	Masyarakat	01 April 2019

Sumber : Diolah Peneliti 2019

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yakni:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian yaitu mengenai kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi

masyarakat di Kota Bandar Lampung dengan cara observasi dan wawancara kepada informan penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari dinas-dinas terkait dengan pengelolaan sampah maupun masyarakat Kota Bandar Lampung dalam bentuk jadi, baik yang dipublikasikan atau tidak, yang telah dikumpulkan oleh penulis dan berhubungan dengan masalah yang telah dibahas.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Fathoni (2011:104) mendapatkan data yang relevan untuk melakukan analisis pembahasan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek penelitian, yang bersumber dari buku maupun literatur.
2. Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung dari objek yang diteliti. Adapun cara-cara yang diunakan dalam penelitian lapangan ini, yaitu:
 - a. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah terjadi sebelumnya, dan ada hubungannya dengan objek penelitian.
 - b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait, yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan obyek penelitian dengan berlandaskan pada tujuan penelitian.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing data

Editing data yakni proses di mana peneliti melakukan keterbacaan konsistensi terhadap data yang sudah terkumpul. Tahapan Editing yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan menyajikan hasil wawancara dan observasi mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Kota Bandar Lampung.

2. Intepretasi data

Intepretasi data yaitu data yang telah di deskripsikan baik melalui tabel maupun narasi yang telah di interpretasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Kota Bandar Lampung. Interpretasi data dilakukan dengan cara menghubungkan hasil wawancara dengan informan maupun hasil-hasil data lainnya dengan teori-teori pada tinjauan dan dokumen lainnya, sehingga dapat diperoleh analisis yang tepat.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pada penelitian ini penulis akan memaparkan teknik analisis data yang sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Moleong (2013:37), reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Menurut Moleong (2013:37), penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*) dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Moleong (2013:37), langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan

pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti. Temuan tersebut dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori.

I. Teknik Keabsahan Data

Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan ini menggunakan teknik triangulasi. Makna triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau data pembanding terhadap data itu (Wiersma, dalam Sugiyono, 2007:372). Berdasarkan klasifikasi adanya lima macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode, maka yang dipergunakan untuk proses validasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Triangulasi sumber dipergunakan dengan cara membandingkan informasi yang didapatkan dengan sumber yang berbeda. Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara oleh peneliti dan dibandingkan dengan fakta hasil observasi atau dengan dokumen yang ada.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung

Pada awalnya, sistem Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung dilakukan oleh 4 instansi yaitu:

1. Untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan menangani sampah di jalan protokol, sapuan jalan, pertokoan restoran, hotel, industri, perkantoran dan fasilitas umum;
2. Untuk sampah di terminal bis antar kota dan dalam kota serta stasiun kereta api dikelola oleh Dinas Perhubungan;
3. Sampah di pasar tradisional dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar;
4. Sampah di pemukiman di kelola oleh kecamatan melalui Sokli
Pengelolaan sampah pasar Pengelolaan sampah di lingkungan pasar dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar. Secara kelembagaan, sebagaimana Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 19 Tahun 2008, Kepala UPT Pasar berada berada di bawah Dinas Pengelolaan Pasar dan secara hirarki bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung. Secara nyata dinyatakan Dinas Pengelolaan Pasar bertanggungjawab terhadap pengumpulan sampah yang berasal dari seluruh pasar dan diangkut ke TPA Bakung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dituntut untuk dapat mengelola sampah dengan baik, melalui satuan kerja perangkat daerah yang secara khusus menangani masalah ini yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebersihan, pertamanan, penghijauan, penerangan jalan, dekorasi kota dan pemakaman umum berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas perbantuan.

Rencana pengelolaan sampah padat Kota Bandar Lampung yang berisi tentang rencana tindak termasuk sasaran pencapaian disusun dengan menggunakan 3 (tiga) skenario alternatif, yaitu :

1. Skenario I: Pengelolaan Sampah Tanpa Perlakuan

Pengelolaan sampah tanpa perlakuan adalah pengelolaan sampah secara konvensional atau mengikuti trend pola pengelolaan sampah selama ini di Bandar Lampung; Artinya tidak ada inovasi untuk melakukan pengelolaan sampah secara terpadu. Sampah yang dihasilkan dari sumber sampah langsung dikumpulkan, diangkut kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah. Pada skenario ini, peningkatan pelayanan sampah hanya dititikberatkan pada kebutuhan sarana dan prasarana sampah (peralatan, alat transportasi, personil dan tempat).

2. Skenario II: Pengelolaan Sampah dengan Perlakuan Pola 3R+P

Pola 3R+P adalah program 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) mengadopsi program pemerintah yang sekarang sedang dilaksanakan ditambah dengan

penekanan pada partisipasi (P) masyarakat. Program 3R tanpa partisipasi masyarakat tidak akan efektif karena program 3R tidak berlanjut bila pendanaan atau dukungan dari pemerintah berhenti. Untuk menjaga keberlanjutan program pengelolaan sampah dengan menggunakan 3R+P, maka prioritas utama dalam skenario adalah pentingnya membangun partisipasi dari masyarakat terutama perlakuan terhadap sampah di sumber timbulan dengan pemilahan dan pemanfaatan. Oleh karena itu, kebutuhan sarana dan prasarana pengangkutan tidak akan sebesar pada skenario I.

3. Skenario III: Pengelolaan Sampah dengan Perlakuan 3R+P+Incenerasi

Pola 3R+P+Incenerasi adalah program 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) yang menekankan partisipasi masyarakat sebagaimana skenario II ditambah dengan upaya melakukan pemusnahan baik di TPS dalam skala kecil maupun di TPA dalam skala besar. Prioritas dalam skenario ini selain pentingnya partisipasi masyarakat dalam segala aspek juga perlunya penyediaan alat pemusnah sampah (*incenerator*) baik skala kecil di tingkat TPS dan TPST maupun incenerasi skala besar di TPA Bakung.

B. Perubahan Unit Pelaksana Pengelolaan Sampah

Pada awalnya untuk menanggulangi masalah sampah di Kota Bandar Lampung ditangani oleh suatu badan yang disebut Badan Pembina Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (BPK3) yang merupakan suatu organisasi yang berada diluarstruktur organisasi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung KarangTeluk Betung Nomor : 21/JK/1972 Jo SK Nomor : 25/HK/1973. Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala

Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung Nomor : 58/B6.III/HK1975 maka organisasi Badan Pembina Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (BPK3) dilebur menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung yang diperkuat dengan Perda Nomor 10 Tahun 1976 Tanjung Karang – Teluk Betung yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah tingkat I Lampung Nomor : G/006/HK/1977 tanggal 1 Februari 1977.

Dengan Adanya Perda Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Tanjung Karang – Teluk Betung, dimana belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 9 ayat 2 tentang pokok-pokok Pemerintahan didaerah junto Keputusan Mendagri Nomor 365 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1976 tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1985, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kotamadya daerah Tingkat II Bandar Lampung. Adanya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan otonomi, yaitu kewenangan Kepala Daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri maka disusunlah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung yang diperkuat dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Bandar Lampung yang dalam pelaksanaan tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang

pertamanan, penghijauan, penerangan jalan, dekorasi kota dan pemakaman umum serta melaksanakan tugas lainnya.

Sejalan dengan adanya perubahan terbaru yang dimulai dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah daerah kota Bandar Lampung; dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung. Sedangkan Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung diatur didalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membuat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Peraturan ini telah disahkan pada tanggal 24 Oktober tahun 2000. Dalam pasal 15 ayat 1 yang berisi tentang larangan membuang sampah atau suatu benda di jalan, trotoar, gang-gang dalam pasar, tepi pantai, sungai, sumber air, parit atau saluran air, selokan air, taman, lapangan dan tanah kosong milik orang lain atau pada tempat umum lainnya. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 tahun 1995 tentang program kali bersih (prokasih)

merupakan salah satu program pemerintah pusat yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas air sungai sehingga memenuhi fungsi peruntukannya. Sungai merupakan salah satu sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kebutuhan hidup sehari-hari sudah selayaknya dilakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian dan kealamiannya. Namun program ini tidak cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut.

BPPLH Kota Bandar Lampung juga sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah sungai di Kota Bandar Lampung. Beberapa upaya tersebut dengan membuat papan peringatan di beberapa bantaran sungai yang berisi himbauan larangan membuang sampah, mensosialisasikan kepada masyarakat melalui kelurahan untuk menjaga lingkungannya serta membuat 25 (dua puluh lima) petugas tim bersih kali sejak tahun 2011. Tim bersih kali ini akan membersihkan setiap sungai dan kali yang ada di Kota Bandar Lampung setiap harinya dengan menggunakan sarana yang telah BPPLH sediakan.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 pasal 26 ayat 1 yang mengatakan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan atau tidak mengindahkan larangan-larangan yang diberikan dan atau tidak menaati kewajiban dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 pasal 15 ini untuk menciptakan Kota Bandar Lampung yang bersih dan

nyaman terutama di daerah aliran sungai. Sejak tahun 2017, pengelolaan sampah dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung.

C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

1. Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung yang merupakan instansi teknis pemerintah Kota Bandar Lampung yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan namanya membidangi masalah lingkungan yang berada di Kota Bandar Lampung. Dan memiliki divisi pencemaran lingkungan yang dapat memantau tingkat pencemaran yang disebabkan kegiatan pembangunan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terdiri dari :

- a. Kepala DLH mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan walikota.
- b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang kesekretariatan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala badan. Sekretariat mempunyai fungsi :
 - 1)Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi;
 - 2)Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;

- 3) Pengelolaan urusan keuangan;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a) Menghimpun dan menyusun program kegiatan
- b) Melaksanakan monitoring kegiatan
- c) Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengelolaan dan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat badan
- b) Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai

- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

- 3) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran badan, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas
 - b) Menyusun pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan pelaporannya
 - c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
- c. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
- Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum lingkungan yang meliputi pelaksanaan teknis, pembinaan, koordinasi pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pembinaan dan penegakan hukum lingkungan. Bidang pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala DLH. Bidang pengawasan pengendalian dan penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- 1) Penyusunan kebijakan teknis dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan lingkungan hidup
 - 3) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dalam pengawasan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 - 4) Penyusunan kebijakan teknis penegakan hukum lingkungan hidup;

5) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dalam penegakan hukum lingkungan hidup;

Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Penegakan Hukum terdiri dari Sub bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

1) Sub bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Sub bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan bahan B3
- b) Menyusun kebijakan teknis pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan bahan B3
- c) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan bahan B3
- d) Menindaklanjuti laporan terjadinya pencemar, kerusakan lingkungan hidup
- e) Menindaklanjuti hasil pengawasan lapangan untuk pelaksanaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku

- f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- 2) Sub bidang pembinaan dan penegakan hukum lingkungan hidup Sub bidang pembinaan dan penegakan hukum lingkungan hidup mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam penegakan hukum lingkungan hidup
 - b) Menyusun kebijakan teknis penegakan hukum lingkungan hidup
 - c) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, penegakan hukum lingkungan hidup
 - d) Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum lingkungan
 - e) Melaksanakan penyidikan kasus lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
 - f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pembinaan dan penegakan hukum
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
- d. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang penataan

dan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi pelaksanaan teknis, koordinasi penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Bidang penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala BPPLH. Dalam melaksanakan tugasnya bidang penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup
- 2) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring penataan lingkungan hidup
- 3) Penyusunan kebijakan teknis pemanfaatan lingkungan
- 4) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring pemanfaatan lingkungan hidup

Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan hidup terdiri atas :

- 1) Sub bidang penataan lingkungan hidup Sub bidang penataan lingkungan hidup mempunyai tugas :
 - a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam penataan lingkungan hidup.
 - b) Menyusun kebijakan teknis penataan lingkungan hidup.
 - c) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam penataan lingkungan hidup.
 - d) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi dalam pembinaan, penerapan, penilaian, evaluasi, pengkajian teknis, AMDAL dan UKL/UPL.

- e) Menyusun kebijakan teknis AMDAL dan UKL/UPL dalam rangka penataan lingkungan hidup.
- f) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, penerapan, penilaian, evaluasi pengkajian teknis AMDAL dan UKL/UPL.
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan hidup serta AMDAL dan UKL/UPL.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. b. Sub bidang pemanfaatan lingkungan hidup

- 2) Sub bidang pemanfaatan lingkungan hidup mempunyai tugas :
 - a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pemanfaatan lingkungan hidup.
 - b) Menyusun kebijakan dalam pemanfaatan lingkungan hidup.
 - c) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam pemanfaatan lingkungan hidup.
 - d) Menyusun petunjuk teknis perizinan dibidang lingkungan hidup.
 - e) Melaksanakan koordinasi, pembinaan perizinan dibidang lingkungan hidup.
 - f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lingkungan hidup dan perizinan dibidang lingkungan hidup.
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup.

- e. Bidang Konservasi dan Mitra Lingkungan Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang konservasi sumber daya alam dan mitra lingkungan hidup meliputi pelaksanaan teknis, pembinaan, koordinasi, konservasi, rehabilitasi lingkungan hidup dan mitra lingkungan. Bidang konservasi dan mitra lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala DLH. Dalam melaksanakan tugasnya bidang konservasi dan mitra lingkungan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 2) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan mitra lingkungan
- 3) Penyusunan kebijakan teknis pengembangan mitra lingkungan hidup
- 4) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring pengembangan mitra lingkungan

Bidang konservasi dan mitra lingkungan terdiri atas :

- 1) Sub bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam Sub bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam serta lingkungan hidup.
 - b) Menyusun kebijakan teknis konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - c) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - d) Menghimpun data untuk pengembangan kawasan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - e) Melaksanakan pengembangan kawasan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.
 - g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan b. Sub bidang mitra lingkungan
- 2) Sub bidang mitra lingkungan mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pengembangan potensi kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan.
 - b) Menyusun kebijakan teknis pengembangan potensi kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan.

- c) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam pengembangan potensi kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan.
- d) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang sosial budaya dan mitra lingkungan.
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang konservasi dan mitra lingkungan.

- f. Bidang Pertambangan dan Energi Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pertambangan dan energi meliputi pelaksanaan teknis, pembinaan, koordinasi, penelitian dan pengembangan serta perusahaan pertambangan dan energi. Bidang pertambangan dan energi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala DLH.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pertambangan dan energi mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi
- 2) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi
- 3) Penyusunan kebijakan teknis perusahaan pertambangan dan energi

- 4) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring perusahaan pertambangan dan energi

Bidang pertambangan dan energi terdiri atas :

- 1) Sub bidang penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi

Sub bidang penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam penelitian dan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif
- b) Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif
- c) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif
- d) Menghimpun dan mengolah data potensi pertambangan dan energi serta air bawah tanah
- e) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang penelitian, pengembangan pertambangan dan energi
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

- 2) Sub bidang perusahaan pertambangan dan energi Sub bidang perusahaan pertambangan dan energi mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam perusahaan pertambangan dan energi

- b) Menyusun kebijakan teknis dibidang pengusahaan pertambangan dan energi
 - c) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan monitoring dalam pengusahaan pertambangan dan energi
 - d) Memberikan rekomendasi bidang pertambangan dan energi
 - e) Menyusun petunjuk teknis perizinan dibidang pertambangan dan energi
 - f) Melaksanakan penetapan royalty pertambangan dan pajak mineral bukan logam dan batuan dan air bawah tanah
 - g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perizinan dan pengusahaan dibidang pertambangan dan energi
 - h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- g. Unit Pelaksana Teknis Sampai saat ini Unit Pelaksana Teknis yang telah dibentuk adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. UPT tersebut mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup, kalibrasi, pemeliharaan alat, sarana dan prasarana laboratorium. Dalam menjalankan tugasnya UPT Lab Lingkungan hidup mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan teknis dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup dan/atau kalibrasi
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pemeliharaan alat, sarana dan prasarana laboratorium
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengelolaan dan penyajian data dan bank data kualitas lingkungan
- 4) Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pembuatan bahan acuan standar, sertifikasi dan bahan uji parameter kualitas lingkungan
- 5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dibidang lingkungan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi dan UPT Laboratorium lingkungan terdiri dari kepala UPT, Kepala sub bagian tata usaha dan Kelompok jabatan fungsional. Kepala UPT bertanggung jawab kepada kepala DLH Kota Bandar Lampung.

3. Visi dan Misi

a. Visi

DLH Kota Bandar Lampung mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan dan keselarasan pemanfaatan sumber daya alam dengan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

b. Misi

- 1) Melaksanakan penataan dan pengendalian lingkungan hidup
- 2) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

- 3) Mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan
- 4) Melaksanakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam lingkungan hidup
- 5) Meningkatkan aksesibilitas informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 6) Mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 7) Meningkatkan fungsi kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup

D. Gambaran Umum Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya Perusahaan Daerah Pasar

Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung berfungsi sebagai alat pengembangan ekonomi Daerah dan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. dalam rangka membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana pasar, meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung harus dikelola secara profesional, efektif, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, bertanggung jawab, dan wajar.

2. Dasar Hukum Terbentuknya Perusahaan Daerah Pasar

- a. Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengatakan
Pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - 2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - 3) memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- b. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2016 tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar
Lampung.

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kedudukan

Perusahaan Daerah Pasar adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Perusahaan Daerah Pasar mempunyai tugas pokok yaitu :

- 1) membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar;
- 2) melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- 3) menyusun dan melaksanakan perencanaan pasar termasuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan;
- 4) melaksanakan pengendalian, pemanfaatan, dan pengembangan operasional baik di dalam area pasar maupun di luar area sekitar pasar yang mempengaruhinya;
- 5) membina pedagang pasar;
- 6) membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar; dan
- 7) meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Perusahaan Daerah Pasar mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan sarana Pasar sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah.
- 2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) PD Pasar Tapis Berseri mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap :

- a) Pengelolaan tempat usaha dan persewaan kios;
 - b) Pengelolaan tempat parkir;
 - c) Pengelolaan fasilitas MCK (mandi cuci kakus);
 - d) Pengelolaan air di wilayah pasar;
 - e) Pengelolaan papan reklame dan media promosi lainnya;
 - f) Pengelolaan pelataran (kaki lima);
 - g) Pengelolaan keamanan di wilayah pasar;
 - h) Pengelolaan sampah dan limbah pasar;
 - i) Penarikan dan /pengumpulan retribusi pasar untuk disetorkan ke Kas Daerah
 - j) Penerimaan atas pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang dan atau segala usaha yang terkait dengan pengelolaan pasar untuk disetorkan ke Kas Daerah.
- 3) Memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan PAD;
 - 4) Melakukan pembinaan kepada pedagang pasar dalam bentuk pinjaman modal kepada pedagang pasar;
 - 5) Berkoordinasi dengan instansi-instansi daerah terkait sehubungan dengan program-program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Pasar di Kota Bandar Lampung.

4. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Peningkatan Pelayanan terhadap Masyarakat Pedagang dan Pembeli, Pengunjung dan Pengguna Pasar melalui Sistem pengelolaan

Pasar Perpasaran Umumnya Masyarakat Sejahtera”. Peningkatan pelayanan dalam rangka pelayanan prima adalah Upaya Pemerintah Kota melalui Kinerja Aparatur Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandar Lampung memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat pengunjung dan pengguna pasar, pedagang dan pembeli dengan cepat tepat terukur, efisien dan efektif. Dengan visi tersebut diatas diharapkan Perusahaan Daerah Pasar dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar perpasaran melalui tugas pokok dan fungsinya berupaya seoptimal mungkin secara professional maupun proporsional didukung keinginan seluruh SDM / Pegawai yang dimiliki untuk memotivasi melakukan inovasi serta perubahan perilaku.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi guna mendukung Visi dan Misi Walikota Bandar Lampung maka Misi Perusahaan Daerah Pasar adalah :

- 1) Meningkatkan Kualitas Aparatur Perusahaan Daerah Pasar (SDM), masyarakat pedagang dan pembeli serta pengunjung dan pengguna pasar
- 2) Meningkatkan Pelayanan bagi masyarakat pedagang, pembeli, pengunjung dan pengguna pasar melalui peningkatan sarana dan prasarana pasar
- 3) Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan retribusi

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan cukup baik, terbukti dari pengupayakan sosialisasi kepada masyarakat dengan menjalankan penyuluhan dan pensosialisasian di berbagai tempat seperti di sekolah-sekolah, kelurahan, kecamatan hingga menempatkan kotak sampah di berbagai lokasi yang berada di Kota Bandar Lampung. Namun sayangnya, masih terjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini, diantaranya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah di berbagai tempat yang tidak seharusnya. Berikut adalah kesimpulan yang dapat di ambil faktor pendukung dan penghambatnya yang telah disajikan oleh penulis:

1. Pada indikator isi kebijakan :

a. Derajat perubahan yang diinginkan

Perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut adalah pada kondisi lingkungan yang menjadi lebih bersih dan sehat. Oleh karena itu, hal tersebut dapat mengurangi resiko banjir serta polusi lebih berkurang juga membantu proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki target untuk mendapatkan penghargaan adipura seperti yang belum sempat didapatkan sebelumnya.

b. Kedudukan pembuat kebijakan

Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kedudukan tertinggi dalam implementasi kebijakan, melalui Instansi Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi ketegasan sikap pemerintah ini masih banyak menemui kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan gagalnya implementasi dari sebuah kebijakan tersebut. sehingga pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur pengelolaan sampah dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar.

c. Siapa pelaksana program

Pelaksana dari program kebijakan pengelolaan sampah ini adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung yang kekuasaannya di berikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

d. Sumber daya yang digunakan

Sumber daya yang digunakan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti halnya dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang mengutamakan kepedulian pada lingkungan dan kebersihan. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan PT. Unilever dengan menempatkan beberapa kotak sampah di titik tertentu, seperti di Taman Gajah, PKOR, juga Stadion Pahoman melalui berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, recycle).

e. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Jenis dan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan pengelolaan sampah adalah agar tercipta pengelolaan sampah yang baik juga menumbuhkan

kesadaran masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan. Manfaat dari mengelola sampah diantaranya adalah menghemat energi, karena dari sampah sendiri bisa diciptakan berbagai jenis bahan bakar yang dihasilkan oleh pupuk kompos. Dan yang kedua, bisa mengurangi polusi. Ketiga memperindah lingkungan sekitar tempat tinggal. Keempat mengurangi dampak penyebab masalah banjir disekitaran bantaran sungai dan siring.

2. Pada indikator Konteks implementasi:

- a. Pemerintah Kota Bandar Lampung melimpahkan kekuasaannya kepada Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tanggung jawab di kota Bandar Lampung. Seperti di wilayah bantaran sungai, jalan trotoar, pemukiman, daerah pasar tradisional, dan daerah terminal
- b. Kebijakan pengelolaan sampah akan mudah dilaksanakan bila tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Bandar Lampung.
- c. Kepatuhan masyarakat akan kebijakan pengelolaan sampah ini masih kurang. Masih banyak masyarakat yang melanggar aturan untuk tidak membuang sampah sembarangan.

B. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran dari penulis, diantaranya :

1. Kebijakan pengelolaan sampah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga kebersihan.
2. Memperbanyak lagi tempat pembuangan sampah di bagian di ruang-ruang terbuka, seperti di trotoar maupun di tempat terbuka lainnya seperti taman dan pasar.

3. Memperbanyak sokli. Agar sokli tidak kewalahan mengambil sampah-sampah di masyarakat dan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.
4. Mewajibkan pemerintah memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar peraturan dan membuang sampah bukan pada tempatnya berupa hukuman denda dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta : CV. Alfabeta.

Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.

Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Echols, John M. Dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris – Indonesia Edisi yang Diperbaharui*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Fathoni , Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Renika Cipta.

George A. Steiner dan John B. Miner. 2007. *Management Policy and Strategy, Alih Bahasa Ticoalu dan Agus Dharma, Kebijakan dan Strategi Manajemen, edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.

Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.

Islamy, M. Irfan. 2007. *Kebijakan Suatu Proses Politik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Jalal Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Adicita.

Mallongi, A. Dan Saleh, M., 2015. *Pengelolaan limbah Padat Perkotaan*. Makassar: Penerbit WR.

Moleong Lexy.J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2008. *Metodologi Penelitian Kesehatan. Edisi revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Nugroho, D. Riant. 2012. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT Alex Media Komputindo: Jakarta.

- Santosa, Slamet. 1998. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sastropoetro, Santoso R.A.. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*?. Bandung : Alumni.
- Setiawan Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset.
- Subarsono, A.G 2008. *Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudrajat. 2006. *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta: Penabar Suwadaya.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik (Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Bandung: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung :Alfabeta.
- Sundariningrum dan Sugiyah. 2001. *Klasifikasi Partisipasi*. Jakarta: Grasindo.
- Sunggono, Bambang. 2004. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tangkilisan. 2003. *Kebijakan*. Jakarta: Media Persada.
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Usman,Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung:CV. Sinar Batu.
- Wibawa, Samodra. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan I*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).

B. Jurnal

Bayu Trisna Desmawan dan Drs. Sukamdi, M.Sc., *Adaptasi Masyarakat Kawasan Pesisir Terhadap Banjir Rob di Kawasan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah*, Jurnal Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Jurnal GeoEco Vol. 1, No. 1 : 83-100. 2010

Darmanto, Ardyanto, Sudjito S., dan Denny W.,. *Pengaruh Kondisi Temperatur Mesophilic Dan Thermophilic Anaerob Digester Kotoran Kuda Terhadap Produksi Biogas*. Jurnal Rekayasa Mesin Vol.3, No.2 : 317-326, 2012.

Darmanto. *Implementasi Kebijakan Tata-Kelola Persampahan di Kabupaten Jombang. Jejaring Administrasi Publik*. Th IV. Nomor 2, : 1294-1314, Juli-Desember 2012.

Puji Winarti dan Azizah, *Penyuluhan Pengelolaan Sampah Plastik dengan Konsep Zero Waste Bagi Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 07 No.: 60-67, 01 Maret 2016.

Talib, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palu*. E-jurnal Katalog, Volume 2 Nomor 1,: 15-22, Januari 2016

C. Skripsi

Dimas, Alfian. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Gemah Ripah Di Dusun Badegan Desa Bantul Kecamatan Bantul Yogyakarta*.

Ismawati, 2017. *Gambaran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah UKM Mandiri di RW 002 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*.

Mirnawati, 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (studi kasus di kecamatan Sukarami Kota Palembang)*.

Talib, 2016. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palu*.

Yulistiawati, Ida Ayu Nyoman, 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Badung*.

D. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

E. Website

<http://www.kupastuntas.co/2018/10/banyak-sampah-berserakan-dlh-bandarlampung-tambah-kontainer-di-beberapa-titik-penampungan/>
(diakses pada tanggal 18/08/2018)

<http://lampung.tribunnews.com/2018/08/13/sampah-hiasi-sungai-sungai-kecil-di-bandar-lampung>(diakses pada tanggal 18/08/2018)

<https://www.saibumi.com/artikel-72969-pengelolaan-sampah-di-bandar-lampung-jadikan-alternatif-yang-menguntungkan.html>(diakses pada tanggal 18/08/2018)

<http://lampung.tribunnews.com/2015/04/24/di-bandar-lampung-200-ton-sampah-dibuang-ke-sungai-dan-laut-setiap-hari>(diakses pada tanggal 18/08/2018)

<http://translampung.com/wacana-perluasan-tpa-bakung-dinilai-kurang-efektif-menangani-volume-sampah/>(diakses pada tanggal 18/08/2018)